

BAB III

ADVOKASI GERAKAN-GERAKAN PEREMPUAN (FEMINIST) MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI UNI EROPA

A. Gerakan-gerakan *Feminist* di Uni Eropa

Sebelum Uni Eropa terbentuk, gerakan perempuan telah ada di Eropa sejak abad 19. Gerakan-gerakan perempuan pada awal abad 19 banyak terpengaruh oleh ide-ide dari tulisan seorang *feminist*, Marry Wollstonecraft (1792), yang berjudul “*Vindication of the Rights of Women*” (Botting, 2016). Ide-ide nya berbicara tentang hak-hak dasar sosial seperti hak kepemilikan, kebebasan bekerja, dan hak pendidikan bagi perempuan.

Pada tahun 1830an, pemikiran-pemikiran baru muncul dari kaum *feminist*, jika ingin merubah ketidaksetaraan tersebut maka hal pertama yang bisa merubah adalah dengan mendapatkan hak politik agar bisa merubah kebijakan-kebijakan yang mengandung ketidaksetaraan (*women’s suffrage*) (Krolokke & Sorensen, 2006). Dalam sejarah modern feminisme, disinilah mulai nya gelombang feminisme pertama (*first wave of feminism*) di Eropa. Gerakan-gerakan perempuan di sebagian besar Eropa—baik dari level lokal hingga nasional—melakukan berbagai demonstrasi, kampanye, dan *lobbying*. Gerakan *feminist* dalam gelombang ini terjadi di Eropa dan berakhir di awal abad 20 dengan berhasil diwujudkan nya tuntutan akan hak politik—untuk memilih dan dipilih—oleh negara (Dorey-Stein, 2015). Pada tahun 1906, *Women’s suffrage* di Finlandia berhasil membuat pemerintah Finlandia sebagai pemerintahan pertama yang menjamin hak politik tersebut. Abad 20 dipenuhi dengan gerakan perempuan di Eropa yang juga mulai berhasil merubah kebijakan negara nya, seperti Denmark (1915), Spanyol (1931), Perancis (1944), dll (Women Suffrage and Beyond, 2017).

Pada tahun 1960an, gelombang feminisme kedua di Eropa terjadi dengan membawa isu-isu yang cenderung mengarah kepada ketidaksetaraan dalam tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan, dan kebebasan perempuan. Saat itu, didorong oleh gerakan-gerakan perempuan, cikal bakal Uni Eropa—yang masih berupa EEC—juga telah memperhatikan masalah kesetaraan gaji dan diskriminasi dunia kerja terhadap perempuan (Rossilli, 1999).

Gelombang feminisme ketiga yang dimulai sekitar tahun 1990 membawa pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan-gerakan *feminist* Uni Eropa hingga saat ini. Gelombang feminisme ketiga—yang sering disebut juga *new feminism*—membawa perubahan menuju gerakan perempuan yang tidak hanya lokal atau nasional tetapi juga transnasional (Krolokke & Sorensen, 2006). Ide ini tidak lepas dari efek globalisasi dan terbentuknya *New World Order* pada waktu itu yang membawa konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) ke Uni Eropa. Gerakan transnasional perempuan dapat membantu Uni Eropa dalam menekan pemerintah negara anggota dalam menjalankan kebijakan pengarusutamaan gender yang telah disepakati di Uni Eropa. Berikut beberapa gerakan feminist transnasional yang mempunyai pengaruh dalam advokasi pengarusutamaan gender di Uni Eropa:

1) *European Women's Lobby* (EWL)

Berdirinya EWL bermula dari konferensi untuk perempuan pada tahun 1987 di London yang dihadiri oleh 120 perempuan yang mewakili 50 juta perempuan dari 85 organisasi perempuan. Dalam konferensi tersebut, dihasilkan 2 resolusi, yaitu untuk membuat sebuah organisasi yang terbuka bagi semua organisasi perempuan di Uni Eropa dan untuk meminta Komisi Eropa datang mendukung dalam pertemuan selanjutnya yang akan membahas pembentukan organisasi tersebut. Pada tahun 1990, Komisi Eropa telah memberikan dukungannya dan menjadikan EWL sebagai partner kerja dari Uni Eropa sendiri. EWL juga diberikan ijin untuk bemarkas besar di Brussel, dekat dengan

institusi-institusi penting milik Uni Eropa (European Women's Lobby, 2015).

EWL merupakan organisasi *non-governmental* terbesar yang menjadi payung organisasi-organisasi perempuan *non-governmental* di Uni Eropa. Pada masa-masa awal, EWL telah berisi organisasi koordinasi nasional (*national coordinating* NGO) dari negara Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, dengan 17 organisasi perempuan besar di Eropa (European Women's Lobby, 2015). Dalam perkembangannya, keanggotaan EWL sangat pesat perluasannya. Pada saat ini, cakupan keanggotaan EWL telah mencapai semua *national coordinating* NGO anggota Uni Eropa ditambah dengan 3 calon anggota Uni Eropa dengan lebih dari 2500 organisasi perempuan di seluruh wilayah Uni Eropa (European Commission, 2011). Ini yang membuat EWL menjadi salah satu organisasi perempuan yang berpengaruh di Uni Eropa.

Sistem keanggotaan EWL dibagi menjadi 3, yaitu: anggota penuh (organisasi perempuan yang legal dan *national coordinating* NGO), organisasi pendukung, dan anggota kehormatan (individu yang ditunjuk/mendaftar). Anggota penuh mempunyai semua hak kegiatan termasuk hak voting dalam pembuatan keputusan EWL sedangkan organisasi pendukung dan anggota kehormatan tidak punya (European Women's Lobby, 2014). Pembuatan keputusan sendiri utamanya berada di tangan *Board of Administration*—yang dipilih dengan periode 2 tahun oleh majelis umum—dan *Executive Committee*. Kemudian, *Secretariat* dan anggota staf bertugas dalam urusan kegiatan harian EWL. Semuanya perempuan.

Dengan keanggotaan dan cakupan yang begitu luas, EWL mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan pengarusutamaan gender di Uni Eropa.

Tidak hanya kepada institusi Uni Eropa saja tetapi kepada publik Uni Eropa sehingga pengarusutamaan gender diharapkan bisa lebih inklusif. Selama 25 tahun berdiri, EWL mempunyai peran penting sebagai jembatan antara masyarakat Eropa dan Institusi Uni Eropa dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender. EWL dapat membantu institusi Uni Eropa dalam menyediakan info atau fakta-fakta terkait kebutuhan, suara, dan kepentingan dari kaum perempuan terkait ketidaksetaraan yang masih terjadi. Disisi lain, EWL juga dapat membantu masyarakat Eropa dalam memonitor dan mengadvokasi Uni Eropa agar di setiap kebijakan dan peraturan yang diberlakukan terjamin adanya pengarusutamaan gender. Saat ini pun, EWL telah aktif berperan sebagai konsultan di Dewan Menteri Eropa. Tidak hanya kawasan Eropa, bahkan pengaruh EWL sampai ke dunia internasional. EWL juga telah berpartisipasi secara rutin dalam segala aktivitas *UN Commission on the Status of Women* (CSW).

Sejak awal, tujuan besar dari EWL ini sendiri adalah terciptanya Eropa yang *feminist* sehingga dalam pelaksanaannya EWL tidak menutup bahasan hanya pada 1 isu gender saja. Secara umum, EWL akan mendukung upaya apa saja yang tujuannya adalah pemberian hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, baik di tingkat negara maupun tingkat organisasi Uni Eropa itu sendiri. Secara khusus, EWL memprioritaskan isu-isu yang berhubungan dengan diskriminasi & kekerasan terhadap perempuan, perempuan dalam politik, independensi perempuan dalam ekonomi, hingga isu-isu horizontal yang ada di Uni Eropa (masalah migrasi, pemuda, dan gerakan-gerakan perempuan). Dari dialog interaktif, demonstrasi, *lobbying*, kampanye, pembuatan acara, hingga publikasi data/fakta terkait kesetaraan gender telah menjadi kegiatan utama EWL. Seluruh kegiatan

dan administrasi EWL sendiri disokong oleh 76% dana dari Komisi Eropa dan sisanya oleh beberapa yayasan, perusahaan, pemerintah negara, dan donasi individu (European Women's Lobby, 2015).

2) *Women In Development Europe+* (WIDE+)

WIDE+ sebelumnya merupakan salah satu cabang dari jaringan besar WIDE yang berdiri pada tahun 1985 di Nairobi saat *UN World Conference on Women* ketiga diadakan. Jaringan WIDE berkembang menjadi jaringan formal yang membawa perspektif feminisme dalam NGO, institusi penelitian, dan kelompok kepentingan yang ada di Eropa. WIDE bermarkas di Brussel tetapi sejak tahun 2011 membubarkan diri dan menjadi WIDE+ hingga saat ini. WIDE+ telah resmi terdaftar di Belgia sebagai NGO internasional yang *non-profit*, independen, transparan, dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang mendukung kesetaraan gender dan keadilan sosial. WIDE+ sendiri merupakan satu-satunya gerakan *feminist* di Uni Eropa yang tidak hanya fokus pada kebijakan dalam tetapi juga kebijakan luar Uni Eropa agar dapat melihat masalah gender di Eropa dari konteks yang lebih global.

Keanggotaan WIDE+ terdiri dari—level nasional hingga regional—organisasi-organisasi pejuang hak perempuan, NGO berkembang, para spesialis *feminist*/gender, aktivis, dan peneliti yang terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung selama tidak kontradiksi dengan visi dan misi WIDE+ yang berlandaskan perspektif *feminist*. WIDE+ juga mempunyai partner kerja dari gerakan perempuan di *Global South*—juga dapat disebut negara dunia ketiga—, agensi-agensi PBB, dan juga institusi Uni Eropa (Women in Development Europe+, 2015).

Dalam struktur organisasi nya, pembuatan keputusan tertinggi WIDE+ ada di Majelis Umum yang diadakan setahun sekali. WIDE+ juga mempunyai badan-badan, seperti : *Caucus* yang berisi 20 anggota

dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dari keseluruhan strategi-strategi maupun program kerja dari WIDE+, *Working Group (Ad Hoc Working Group)* yang bertugas melanjutkan strategi *caucus* dalam implementasinya dan dapat diisi oleh bukan anggota—misalnya para ahli dan aktivis gerakan perempuan—asal tidak kontradiksi terhadap visi & misi WIDE+, dan *Board* yang mengatur segala urusan administrasi dan keuangan terdiri atas pimpinan, sekretaris, dan bendahara yang bergilir (Women in Development Europe+, 2015).

Pada masa awal, WIDE+ banyak mengangkat isu-isu kesetaraan gender, terutama yang berhubungan dengan isu ketidaksetaraan yang terjadi di dalam ekonomi (perdagangan). WIDE+ juga terus memonitor kebijakan-kebijakan Uni Eropa dalam perdangannya untuk menjamin bahwa perspektif feminisme memang digunakan dalam kebijakan tersebut dan implementasinya. WIDE+ semakin meluaskan isu-isu yang menjadi bahasan atau tuntutan nya. Tidak hanya masalah ketidaksetaraan gender di perdagangan tetapi *gender mainstreaming* seperti dalam migrasi, hak-hak sosial perempuan, dan pembangunan di kawasan Eropa (Lobby Facts, 2017).

Dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mengangkat perspektif feminisme, WIDE+ telah banyak berpartisipasi dalam melancarkan agenda-agenda internasional seperti *Beijing Declaration* dan *Sustainable Development Agenda (SDGs)* terutama di level Uni Eropa. WIDE+ juga aktif menyuarakan tuntutan nya melewati banyak cara, seperti publikasi laporan/pertanyaan mengenai isu terkait atau dengan petisi. Selain itu, perjuangan menyetarakan gender juga terus dilakukan oleh WIDE+ dengan berbagai konferensi maupun *working group* baik nasional hingga internasional dan baik anggota WIDE+ maupun non anggota. Terkadang, WIDE+ juga melakukan

kerjasama dengan sesama jaringan *feminist* besar di Uni Eropa, seperti dengan *European Women's Lobby* pada tahun 2016 silam (European Women's Lobby, 2016). Semua ini karena kolaborasi dari anggota WIDE+ dan donatur yang mampu untuk mandiri secara finansial, dalam artian tidak diberi sokongan oleh PBB maupun Uni Eropa sendiri.

Kemampuan *lobbying* dan advokasi WIDE+ juga telah sampai ke level institusi Uni Eropa sendiri. WIDE+ telah mampu untuk menyuarakan langsung tuntutan dan argumen nya dalam konferensi-konferensi yang diadakan oleh institusi Uni Eropa—seperti Komisi Eropa dan Dewan Eropa—terutama dalam kebijakan sosial dan perdagangan. Hal ini telah sesuai dengan tujuan utama dari WIDE+ sendiri sejak awal pendiriannya yaitu adanya transformasi sosial yang dimulai dari perubahan kebijakan dari level Uni Eropa agar terpenuhinya hak-hak dasar yang membebaskan laki-laki dan perempuan dalam hak kepemilikan, hak memilih, dan hak atas peningkatan kualitas hidupnya (Women in Development Europe+, 2015).

3) *European Institute of Women's Health* (EIWH)

EIWH merupakan gerakan *feminist* berbentuk transnasional NGO non-profit yang telah berdiri sejak tahun 1996. Secara resmi, EIWH telah terdaftar ke dalam hukum Irlandia dan mempunyai markas utama di Dublin, Irlandia saat ini (Lobby Facts, 2017). EIWH merupakan satu-satunya gerakan perempuan besar di Uni Eropa yang mengupayakan pengarusutamaan gender khusus di bidang kesehatan. Ketidaksetaraan gender dalam kesehatan antara laki-laki dan perempuan masih banyak terjadi di segala segi, seperti : akses, ketersediaan/fasilitas, kebutuhan khusus (obat-obatan), perawatan/pencegahan segala penyakit, hingga status.

Seperti gerakan-gerakan *feminist* di Uni Eropa pada umumnya, struktur organisasi EIWH sangat terbuka terhadap keanggotaan baik individu maupun organisasi

dengan syarat mempunyai visi dan misi yang sama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Eropa terutama dalam kesehatan. EIWH mempunyai 1 badan penting yaitu *Board of Directors* (BoD) yang merupakan perwakilan dari para anggota dan bertugas untuk mengatur segala urusan EIWH. BoD mempunyai tim khusus para ahli (*Expert Advisory Group*) yang mereka pilih. Tim para ahli ini bertugas untuk mengawasi dan memandu semua kebijakan dan aktivitas EIWH. Di dalam BoD juga ada kesekretariatan yang dipimpin oleh Direktur Umum dalam mengatur dan menjaga segala urusan harian EIWH dari hal-hal administratif hingga berbagai macam pertemuan dan hubungan dengan partner luar, termasuk Uni Eropa dan agensi-agensi internasional (European Institute of Women's Health, 2017). Keanggotaan dari EIWH sendiri ada yang organisasi maupun individu yang mempunyai latar belakang profesi berbeda-beda. Ada pula yang hanya berstatus sebagai *volunteer* dalam membantu proyek EIWH.

Sejak awal EIWH memang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan pengarusutamaan gender dalam hal kesehatan di Uni Eropa. EIWH ingin menciptakan adanya kesetaraan gender dalam *public health* baik di tingkat nasional maupun tingkat Uni Eropa. Oleh karena itu, *gender-sensitive* menjadi pendekatan utama yang digunakan EIWH dalam mengadvokasi pengarusutamaan gender, terutama dalam hal pencegahan penyakit, penelitian-penelitian kesehatan, perawatan/pemfasilitasan, dan kebijakan kesehatan & sosial. Menurut EIWH, pendekatan *gender-sensitive* sangat penting bagi tercapainya standar kesehatan tertinggi bagi semua. Seluruh lapisan masyarakat harus menyadari bahwa kebutuhan, hambatan, dan kesempatan kesehatan yang ditemui antara perempuan dan laki-laki itu berbeda—mengingat variabel biologi kedua nya yang memang

berbeda—sehingga segala kebijakan kesehatan dan peran bagi keduanya tentu harus sensitif terhadap perbedaan ini agar dapat terciptanya kesetaraan (European Institute of Women's Health, 2017).

EIWH telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuannya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan permasalahan kesehatan perempuan yang berbeda dengan laki-laki, EIWH banyak melakukan penelitian dan survey yang nantinya dipublikasikan agar seluruh lapisan masyarakat Eropa dapat melihat. EIWH juga melakukan beberapa program pelatihan, seminar, hingga konferensi kesehatan untuk menunjukkan isu secara lebih substantif. Seiring dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, advokasi untuk membentuk kebijakan kesehatan di Uni Eropa agar *gender-sensitive* juga dilakukan dengan terus melakukan pendekatan dengan Komisi Eropa dan negara anggota Uni Eropa agar menempatkan pengarusutamaan gender di segala kebijakan berkaitan dengan kesehatan. EIWH juga merupakan anggota dari *patients and consumer working party* di agensi Uni Eropa yaitu *European Medicines Agency* agar dapat melakukan advokasi perizinan edar obat-obatan di dalam Uni Eropa (Lobby Facts, 2017). Semua aktivitas dan proyek yang dilakukan EIWH biasanya mendapatkan dana dari sponsor maupun donasi dari perusahaan maupun individu. Banyak juga proyek EIWH yang mendapat bantuan finansial dari Uni Eropa secara langsung.

4) *European Student's Union* (ESU)

ESU telah berdiri sejak 1982 dengan nama *the West European Student Information Bureau* (WESIB) dan hanya beranggotakan 7 persatuan pelajar nasional. Setelah perubahan tatanan politik di Eropa Barat maupun Timur dan berbagai perkembangan, pada tahun 2007 namanya pun berganti menjadi ESU dan

bermarkas tetap di Brussel, Belgia, hingga sekarang. ESU telah menjadi organisasi yang memayungi 46 persatuan pelajar nasional dari 39 negara Eropa. ESU terbuka untuk semua pelajar tanpa diskriminasi ras, seks, negara dan merupakan badan independen yang memperjuangkan pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat Eropa. (European Consortium for Accreditation, 2013)

Dalam struktur ESU, pertemuan tertinggi berada pada *Board Meeting*—berisi delegasi dari masing-masing anggota—yang bertemu dua kali dalam setahun. Sebagai badan tertinggi, *Board* berhak memilih 10 perwakilan yang bertugas sebagai *Executive Committee* selama setahun. Komite ini bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kebijakan yang telah diputuskan pada *Board Meeting*, baik secara politik maupun finansial. Komite eksekutif didukung oleh 3 koordinator, para ahli, dan *working group*. Kesekretariatan dan *Commission for Internal Auditing* juga dibentuk untuk memudahkan kerja komite dalam urusan administratif kegiatan berbasis harian dan menangani masalah finansial di ESU (European Student's Union, 2018).

Sejak awal, ESU memang bukan gerakan yang hanya fokus kepada kesetaraan gender tetapi lebih kepada perjuangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Eropa. Namun, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan juga merupakan salah satu tujuan utama yang diadvokasikan ESU kepada Uni Eropa. ESU mewakili suara/kepentingan lebih dari 15 juta pelajar yang ada di Eropa dalam memperjuangkan posisi, kesempatan, dan partisipasi pelajar ke dalam kebijakan-kebijakan untuk pendidikan yang lebih tinggi, baik di level nasional maupun di level Uni Eropa. Gerakan feminisme dalam ESU dapat dilihat dari satu-satunya visi ESU dan rencana kerja 2018 nomor 7A yang mengedepankan

hak pendidikan dan kesempatan sosial yang setara untuk pelajar tanpa melihat laki-laki atau perempuan. ESU meyakini nilai-nilai kualitas, aksesibilitas, dan keadilan untuk semua—tanpa memandang gender, suku, agama—akan mempermudah dalam mencapai sistem pendidikan yang lebih tinggi di Eropa (Lobby Facts, 2017).

ESU telah diakui sebagai organisasi dengan advokasi yang telah profesional dan menjadi salah satu pemangku kepentingan di level Uni Eropa, bahkan hingga level internasional. Banyak kerja sama dan *partnership* yang telah dilakukan ESU bersama dengan berbagai partner baik dari badan-badan Uni Eropa hingga organisasi internasional atau perusahaan. Level advokasi ESU telah mencapai tahap dimana ESU berhasil menjadi anggota dari *European Youth Forum* dan berkontribusi dalam merekomendasikan kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat Uni Eropa. Selain melakukan advokasi untuk merubah kebijakan pendidikan di level Uni Eropa, ESU juga mempunyai program kerja seperti mengadakan *workshop*, seminar, *policy paper*, kampanye, konferensi, penelitian dan publikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperjuangkan pendidikan dan meningkatkan pendidikan di Eropa. Seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan ESU tersebut biasanya mendapatkan dana dari berbagai pihak yang menjadi sponsor, partner, maupun donasi, seperti *Essa Project* dan *Extra Sup*. Kemudian, untuk proyek pelatihan biasanya mendapatkan subsidi dari Komisi Eropa, seperti program Erasmus+ pada tahun 2018 ini (European Student's Union, 2018).

B. Tuntutan-tuntutan Gerakan Perempuan di Uni Eropa

Sejak tahun 1992 hingga tahun 2018, gerakan-gerakan perempuan di Uni Eropa mempunyai beragam isu yang

diangkat secara spesifik di dalam usaha pengarusutamaan gender. Mulai dari urusan politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, hingga permasalahan imigran. Namun, yang akan penulis paparkan disini adalah bentuk/bidang tuntutan yang menjadi standar kesetaraan gender milik PBB dalam menentukan indeks kesetaraan gender dunia. Berikut adalah pemaparan tuntutan gerakan-gerakan *feminist* kepada Uni Eropa yang dilihat dari 4 standar pengukuran GDI dan GEM:

1) Politik

Sejak masa awal Uni Eropa dibentuk, kawasan Eropa memang termasuk yang lebih maju dibandingkan dengan yang lain jika berkenaan dengan kesetaraan gender dalam politik. Gelombang pertama feminisme telah membawa keberhasilan atas tuntutan-tuntutan perempuan akan hak memilih dan dipilih dalam urusan politik di beberapa negara Eropa, terutama Eropa Barat (Krolokke & Sorensen, 2006).

Pada masa awal Uni Eropa berdiri, memang beberapa negara Uni Eropa telah memiliki kebijakan yang menjamin adanya partisipasi politik perempuan di dalam negara tetapi masih banyak negara yang belum menjamin hak dasar tersebut untuk perempuan. Ditambah lagi, sebagian besar kebijakan tersebut hanya ada tetapi tidak terealisasi secara nyata. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan awal lebih untuk menjamin terlebih dahulu adanya kebijakan yang memang menjamin hak politik perempuan di Uni Eropa. Setelah *Beijing Conference* tahun 1995, tuntutan gerakan-gerakan perempuan yang ada di Uni Eropa meluas kepada realisasi dari isi *Beijing Platform for Action* tersebut, yaitu peningkatan partisipasi politik bagi perempuan di negara-negara Uni Eropa (European Women's Lobby, 2016).

Di abad 21, tuntutan kesetaraan gender di bidang politik banyak menyoroti tentang kebijakan Uni Eropa

yang masih dipandang oleh gerakan-gerakan perempuan sebagai sesuatu yang hanya sebatas komitmen-komitmen dan kebijakan tak terikat sehingga dibutuhkan mekanisme institusional yang lebih kuat dan efektif agar partisipasi perempuan dapat secara nyata terwujud. Tuntutan juga banyak yang menyoroti masalah dua pendekatan yang digunakan oleh Uni Eropa dalam upaya kesetaraan gender, yaitu pengarusutamaan gender dan *specific actions*. Pengarusutamaan gender dan *specific actions* dalam politik belum menampakkan hasil yang maksimal hingga saat ini. Dapat dilihat dari hasil partisipasi politik perempuan dalam indeks kesetaraan gender Eropa lebih rendah daripada partisipasi di bidang lain. Oleh karena itu, abad 21 banyak dipenuhi oleh tuntutan akan *specific actions* seperti adanya kuota gender—baik kuota partai maupun kuota kursi legislatif—, *positives actions*, dan fasilitas *child care* agar menjadi kebijakan yang dapat diberlakukan secara mengikat di semua negara Uni Eropa (European Women's Lobby, 2005).

Tuntutan juga disuarakan untuk tidak hanya meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen nasional atau pun pemimpin negara tetapi juga di dalam badan Uni Eropa sendiri, seperti Parlemen Eropa, Komisi Eropa, atau pun Komite-komite di dalamnya. Para kaum *feminist* meyakini bahwa untuk menciptakan Uni Eropa yang demokratis maka demokrasi harus adil, dalam artian bahwa demokrasi harus bisa secara setara mewakili suara dari perempuan dan laki-laki dalam pembuatan keputusan (Godding, 2013).

Selain itu, tuntutan gerakan perempuan juga mengarah kepada upaya kampanye untuk menghilangkan *stereotypes* dan diskriminasi atas perempuan yang dianggap tidak berhak berpolitik. Oleh karena itu, tuntutan akan adanya kebijakan mengenai

anti diskriminasi—baik diskriminasi dari masyarakat hingga media—yang secara eksplisit menyebutkan “anti diskriminasi gender” juga disuarakan (European Women's Lobby, 2008). Selain itu, tuntutan untuk pemberdayaan perempuan—baik dari segi skill ataupun akses—agar mau dan mampu menjadi kandidat politik juga banyak disuarakan dalam dekade ini.

2) Ekonomi

Sejak awal Uni Eropa berdiri, partisipasi perempuan di dunia kerja telah cukup tinggi sebagai dampak dari industrialisasi dan globalisasi. Walaupun partisipatif, ketidaksetaraan gender terus ada karena upah/gaji yang dihasilkan perempuan masih jauh selisih nya dibanding laki-laki bahkan hingga saat ini masih berada di angka 17% dengan selisih upah pensiun sebesar 40% (European Youth Portal, 2013). Padahal, isu *gender pay gap* justru merupakan kebijakan kesetaraan gender pertama yang diadopsi oleh Uni Eropa (EWL, 2018).

Pada umumnya, tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh gerakan perempuan dalam kurun dua dekade ini tidak lepas kaitannya dengan upaya untuk menyetarakan *gender pay gap* baik di level negara maupun Uni Eropa sendiri. Contohnya : tuntutan agar adanya strategi dan pengawasan terhadap kebijakan mikro dan makro ekonomi mengenai akses perempuan dalam pekerjaan dan diadopsi nya kebijakan yang menjamin upah minimum rata-rata kerja (European Women's Lobby, 2010).

Gerakan-gerakan *feminist* juga meyakini penyebab dari selisih upah tersebut dikarenakan segregasi dalam pekerjaan yang bersumber dari tidak adanya rekonsiliasi antara dunia kerja dan keluarga (Houston, 2005) serta tidak adanya perlakuan yang setara gender dalam semua level / jenis kerja. Oleh karena itu, dari awal abad 21 hingga saat ini tuntutan gerakan

perempuan di Uni Eropa banyak yang menyoroti tentang *parental leave* (perizinan cuti untuk mengurus anak bagi suami atau istri yang bekerja agar bisa bergantian tanpa harus berhenti dari pekerjaan), pengadaan *child care/elder care* (fasilitas perawatan dan penjagaan anak agar laki-laki dan perempuan bisa sama-sama bekerja) yang berkualitas dan terjangkau harganya, dan penghilangan diskriminasi sosial ataupun *social exclusion* antar gender.

Tuntutan agar urusan kerja dan rumah tangga dapat berekonsiliasi tidak hanya dengan adanya kebijakan *parental leave* saja, ada *maternity leave* dan *paternity leave* yang telah disuarakan sejak awal abad 21 dengan harapan agar perempuan dapat kembali lagi bekerja tanpa harus mengundurkan diri karena alasan kehamilan, kelahiran, atau pasca kelahiran. Gerakan-gerakan perempuan juga banyak yang mengharapkan kebijakan diatas juga membuat pekerja berkaitan tetap diberikan gaji, baik terhitung penuh atau hanya setengah gaji (*paid sparental/maternity/paternal leave*) dan waktu cuti juga diharapkan minimal sekitar 2 minggu (European Women's Lobby, 2013). Setelah beberapa kebijakan diatas akhirnya diadopsi, sebagian besar kebijakan baik regulasi maupun *directives* dari Uni Eropa masih belum mencapai target nya di dalam pengadaan *child care* dan penerapan hak izin berbayar. Bahkan pada tahun 2014, Komisi Eropa sempat akan menanggalkan beberapa *directives* tentang *parental leave* yang tentu nya langsung disambut banyak protes dan tuntutan dari gerakan-gerakan perempuan di Uni Eropa (EWL, 2014).

Gerakan perempuan di Uni Eropa juga banyak mengajukan tuntutan agar Uni Eropa menjamin hak-hak perempuan dalam bekerja, seperti : perlindungan untuk perempuan hamil di tempat kerja, dijamin nya kesetaraan perlakuan serta status antara perempuan dan laki-laki di dalam pekerjaan, dan diupayakan nya

perempuan sebagai pemangku kebijakan ekonomi baik di level perusahaan atau bank sentral nasional maupun Uni Eropa sendiri. Peralunya, banyak perempuan yang bekerja masih di area sektor rendah—seperti pertanian, UMKM, atau buruh—dan belum dianggap mampu untuk mempunyai pekerjaan berlevel perusahaan besar atau berposisi sebagai manager, tim direksi perusahaan, atau pemangku kebijakan ekonomi) (European Women's Lobby, 2014). Untuk mendukung ini, kaum perempuan juga mengharapkan adanya kebijakan yang mendukung perempuan di dalam sektor kewirausahaan agar kualitas pekerjaan serta gaji perempuan dapat meningkat.

Selain tidak adanya dukungan dan fasilitas-fasilitas seperti diatas, pengucilan sosial dan kemiskinan juga menjadi hal utama mengapa perempuan berpendapatan lebih rendah. Menurut penelitian *European Women's Lobby*, kaum perempuan pada tiap tingkatan berdasarkan umur masyarakat berada pada kondisi yang lebih miskin daripada laki-laki. Oleh karena itu, gerakan perempuan juga mendukung adanya kebijakan yang tidak hanya memberi dukungan dan fasilitas tetapi juga menghilangkan diskriminasi dan kemiskinan dengan perpektif *feminist* (European Women's Lobby, 2010).

Selain itu, gerakan-gerakan perempuan telah dalam satu dekade ini menuntut adanya kebijakan kesetaraan gender dalam ekonomi khususnya terkait dengan perdagangan yang dinilai masih *gender-blind* di Uni Eropa. Hingga tahun 2016, perempuan tidak pernah disebutkan dalam perjanjian/kesepakatan perdagangan Uni Eropa. Dalam urusan perdagangan pun hanya ada 1 staf yang mempunyai mandat berbau gender. Padahal, ketidaksetaraan gender banyak terjadi di sektor perdagangan. Banyak pekerja perempuan atau pengusaha perempuan yang hanya bergerak di sektor minor (pertanian atau usaha kecil-menengah) tidak

terwakili suaranya dan tidak mendapat perlindungan jika dibandingkan dengan perusahaan besar dan maju yang masih didominasi oleh pengusaha laki-laki. Oleh karena itu, gerakan perempuan banyak yang menuntut adanya kebijakan perdagangan yang sensitif akan isu gender. Perlindungan terhadap hak perempuan dalam sengketa atau hak-hak properti dan adanya badan khusus untuk memonitor implementasi kebijakan gender dalam perdagangan di perusahaan-perusahaan makro maupun mikro merupakan hal yang dinilai perlu untuk dilakukan oleh Uni Eropa sebagai upaya pengarusutamaan gender (WIDE+, 2017)

Hingga saat ini telah banyak kebijakan gender dalam ekonomi yang berhasil diadopsi Uni Eropa. Namun, implementasinya masih banyak yang tidak sesuai. Oleh karena itu, tuntutan gerakan perempuan pada beberapa tahun terakhir cenderung mendorong Uni Eropa untuk menjadikan kebijakan-kebijakan gender dalam ekonomi yang mengikat ke semua negara anggota, memperkuat institusi/badan-badan gender, strategi serta koordinasi baik internal maupun pihak eksternal agar upaya kesetaraan gender bisa inklusif (WIDE+, 2017).

3) Pendidikan

Berbeda dengan isu ketidaksetaraan gender dalam bidang lain, ketidaksetaraan gender di pendidikan termasuk isu yang lebih jarang untuk diangkat atau didiskusikan. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan tinggi, termasuk di tingkat pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi). Seperti yang telah dipaparkan di bab 2 pada skripsi ini. Namun, bukan berarti ketidaksetaraan gender tidak diperjuangkan sama sekali dalam bidang ini. Permasalahan ketidaksetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Uni Eropa umumnya terjadi karena segregasi dalam bidang ilmu tertentu yang berpengaruh kepada karir dan

rendahnya tingkat gaji perempuan. Tidak dapat dipungkiri juga, partisipasi perempuan dalam pendidikan di beberapa negara berkembang juga masih ada yang belum setara dengan laki-laki.

Tuntutan gerakan-gerakan perempuan pada umumnya mengarah kepada dikuatkannya pengarusutamaan gender termasuk akses bagi perempuan, terutama dalam hal finansial dan penghilangan *stereotype* gender dalam keluarga (European Student's Union, 2018). Gerakan-gerakan perempuan juga meyakini pentingnya meratakan segregasi yang terjadi di Uni Eropa. Seperti yang telah dipaparkan di bab 2, perempuan yang telah berpartisipasi di pendidikan tinggi cenderung memilih bidang pendidikan yang sama dan tidak meluas ke area STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*). Hal ini dikarenakan adanya *stereotype* gender di bidang STEM yang “maskulin”, di kurikulum & cara mengajar, dan di media yang semuanya seolah telah membatasi mana yang “lumrah” untuk perempuan dan mana yang “lumrah” untuk laki-laki. Segregasi juga terjadi karena pilihan perempuan sendiri untuk tidak mau masuk ke bidang STEM dan memilih masuk ke bidang yang “lumrah” perempuan (European Parliament, 2015; European Institute for Gender Equality, 2018) (European Student's Union, 2008). Oleh karena itu, gerakan *feminist* mengharapakan adanya kebijakan dari Uni Eropa yang mampu mengintegrasikan perguruan-perguruan tinggi untuk menjadikan pendidikan lebih *female friendly environment*.

Tuntutan *female friendly environment* termasuk untuk meningkatkan kesadaran perempuan agar mau meluaskan pendidikan ke segala subjek pendidikan, mengurangi *gender-biased* dalam pendaftaran mahasiswa baru, serta memfasilitasi perempuan yang mempunyai anak dengan *child care* (Bagniewska,

2017). Pada intinya, gerakan perempuan mengharapkan Uni Eropa untuk bisa merangkul institusi-institusi pendidikan agar diskriminasi yang terjadi dapat dihilangkan dan kesetaraan dalam perlakuan & kesempatan pendidikan dapat terbuka untuk laki-laki maupun perempuan, baik dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi.

Gerakan-gerakan feminis pendidikan juga menggarisbawahi mengenai permasalahan pelajar internasional yang di dalam Uni Eropa seharusnya telah dipermudah pendidikan antar negara nya. Gerakan persatuan pelajar di Uni Eropa mengharapkan Uni Eropa untuk melakukan tindakan agar kesetaraan kesempatan dan perlakuan tidak hanya di dalam negara tetapi juga dalam memperlakukan pelajar internasional (Executive Committee ESU, 2014). Selain itu, aspek kesetaraan pendidikan harus inklusif. Tidak hanya kesetaraan pelajar tetapi institusi pendidikan juga seharusnya setara. Tuntutan menggarisbawahi bahwa dalam struktural pendidikan tinggi (pimpinan/rektor, staf, peneliti, maupun dosen) juga harus mampu mewakili kedua jenis gender agar kebijakan pendidikan dalam institusi tersebut juga mewakili kepentingan baik laki-laki maupun perempuan (European Student's Union, 2008).

Beberapa tahun terakhir, tuntutan gerakan *feminist* juga menyoroti permasalahan yang tidak pernah diangkat Uni Eropa sebelumnya, yaitu isu perempuan yang disabilitas dan imigran perempuan. Kebijakan-kebijakan Uni Eropa mengenai penyandang disabilitas memang telah ada tetapi tidak berbasis gender. Padahal, 60-70% perempuan di Uni Eropa yang disabilitas juga buta huruf. Oleh karena itu, gerakan *feminist* menuntut minimal adanya fasilitas literasi digital agar penyandang disabilitas perempuan juga bisa berpendidikan (European Women's Lobby, 2013). Kemudian, kebijakan anti diskriminasi juga seharusnya

diterapkan untuk imigran perempuan yang telah mencoba mengenyam pendidikan di Uni Eropa karena bagaimanapun imigran-imigran tersebut telah terhitung di dalam kualitas kesetaraan gender di Uni Eropa (EWL, 2011)

4) Kesehatan

Memasuki tahun 2010 hingga sekarang, gerakan-gerakan perempuan mengharapkan Uni Eropa tidak hanya berfokus pada pengarusutamaan gender dalam *high politic*. Kondisi tidak setara dalam kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan tetapi juga karena peran gender yang berlaku dalam sosial Uni Eropa. Pada kenyataannya, perempuan di Uni Eropa hingga saat ini masih memegang posisi sosial yang cenderung lebih rendah dari laki-laki (*gender pay gap* dan *pensiun gap*). Apalagi hasil laporan menunjukkan perempuan terutama lansia di Uni Eropa lah yang lebih besar mengkonsumsi obat-obatan dan pelayanan kesehatan dibanding laki-laki (European Institute of Women's Health M, 2013). Padahal, semakin rendah posisi sosial seseorang, semakin berkurang kemampuan (finansial) untuk mengakses dan mendapat perlindungan kesehatan, kemudian semakin buruk juga tingkat kesehatan nya. Jika demikian, semakin buruk juga kualitas hidup hingga harapan hidup orang tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, menurun nya kualitas hidup dan angka harapan hidup ini tentu berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa.

Pada intinya, tuntutan oleh gerakan-gerakan perempuan di Uni Eropa menitikberatkan pada peningkatan kesadaran baik oleh Uni Eropa maupun masyarakat akan perbedaan yang memang ada antara perempuan dan laki-laki. Secara seks dan gender, perempuan memang mempunyai kebutuhan akan akses, peralatan, serta perlakuan kesehatan yang berbeda

dengan laki-laki (European Women's Lobby, 2010). Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan kemudian mengharapkan adanya kebijakan yang sensitif akan perbedaan perempuan—terutama pada masa kehamilan, kelahiran, hingga pasca nya—dalam mendapatkan akses, perawatan, hingga peralatan kesehatan terkini (European Women's Lobby, 2010; Lobby Facts, 2017). Tidak hanya itu, tuntutan kebijakan juga termasuk kesehatan pada generasi tua perempuan yang nyata nya tidak banyak dilibatkan dalam uji klinis berbagai peralatan dan obat-obatan. Kaum perempuan mengharapkan semua gender terwakilkan dalam uji klinis agar obat dan alat tepat sasaran (European Institute of Women's Health M, 2013; Lobby Facts, 2017).

Selain itu, tuntutan lain yang diupayakan oleh kaum *feminist* juga untuk mengadvokasi kebijakan Uni Eropa agar mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai isu ketidaksetaraan gender, kemudian menjamin pencegahan, perlindungan, dan fasilitas terhadap kekerasan yang diterima perempuan di segala aspek. Tuntutan ini sering disebut dengan *Stop Violence Against Women* (VAW). Kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan tidak mengenal kelas, ras, umur, maupun budaya karena kekerasan terhadap perempuan nyata nya ada di setiap negara di dunia. Banyak kasus terjadi dimana perempuan diperlakukan kasar, dilecehkan, hingga diperkosa oleh laki-laki yang tidak hanya orang asing tetapi justru kerabat dekat nya sendiri dengan alasan bahwa perempuan hakikatnya memang lebih rendah, lebih lemah, bisa diatur, dan harus patuh terhadap laki-laki (*stereotype* gender). Hal ini dinilai memengaruhi mental dan fisik perempuan yang nantinya berdampak pada gangguan kesehatan yang berujung kematian (EWL, 2017).

Sejak tahun 2011, gerakan perempuan juga banyak mengajukan tuntutan kepada Uni Eropa dan negara

anggota untuk melarang kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencederai hak reproduksi dan kesehatan perempuan. Seperti isu *surrogacy*—menempatkan rahim perempuan sebagai tempat sewa untuk mengandung dan melahirkan anak orang lain—yang marak terjadi baik berbayar maupun tidak dibayar. Meskipun banyak perdebatan tetapi sebagian besar gerakan *feminist* di Uni Eropa setuju bahwa *surrogacy* merupakan bentuk pencederaan terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan (European Women's Lobby, 2017). Ada juga isu *female genital mutilation*—tindakan memotong, membuang, atau menindik bagian luar kemaluan perempuan yang dilakukan tanpa sebab medis—yang juga harus dilarang baik di level negara maupun Uni Eropa.

Kemudian, ada juga isu aborsi yang telah banyak merenggut nyawa perempuan. Berbeda dengan isu sebelumnya, kali ini tuntutan justru untuk menjamin diselenggarakannya aborsi yang aman. Meskipun juga banyak perdebatan yang sedikit-banyak dipengaruhi oleh label budaya akan aborsi, banyak *feminist* yang meyakini jika aborsi dilegalkan dan dijamin keamanannya maka akan lebih menyelamatkan perempuan yang mungkin dalam kondisi tertentu atau alasan tertentu harus melakukan aborsi (European Women's Lobby, 2014).

Agar tercapai peningkatan kesetaraan gender dalam kesehatan secara berkelanjutan, gerakan-gerakan perempuan menuntut Uni Eropa tidak hanya membuat regulasi maupun *directives* tetapi juga mekanisme implementasinya, seperti : *action plan/program/strategi*, penelitian dan pengembangan isu, atau fasilitas crisis/help center. Kaum *feminist* juga mengharapkan Uni Eropa semakin meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gerakan-gerakan perempuan, terutama dalam hal peningkatan kesadaran.

Ada satu isu yang membutuhkan tidak sekedar

kebijakan namun kesadaran masyarakat, yaitu isu merokok bagi perempuan. Merokok memang berbahaya, apalagi jika perempuan yang sedang hamil. Efek jangka panjangnya tentu dapat meningkatkan angka kematian dan menurunkan angka kelahiran akibat penyakit ibu hamil yang perokok. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun penting diberi kesadaran untuk tidak merokok terutama yang mempunyai istri hamil. Belum lagi efeknya bagi pemuda dan pemudi. Oleh karena itu, isu ini juga penting untuk diperhatikan oleh Uni Eropa terkait dengan efek jangka panjang yang mungkin terjadi (the European Institute of Women's Health, 2017).

C. Advokasi dan Hasil Advokasi Gerakan Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender di Uni Eropa

Dari tahun 2008 hingga tahun 2018, kegiatan advokasi aktif dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuan yang telah dijelaskan di dalam bab 3.A dengan membawa tuntutan-tuntutan yang sebagian besar telah dijelaskan di dalam bab 3.B. Seperti yang telah dijelaskan di dalam kerangka teori advokasi (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013), advokasi yang dilakukan oleh 4 gerakan perempuan Uni Eropa ini tidak hanya memasuki salah satu proses pembuatan kebijakan saja, gerakan perempuan tersebut telah berupaya untuk dapat masuk ke segala celah proses pembuatan kebijakan publik—baik dari proses legislasi, proses politik & birokrasi, hingga proses sosialisasi & mobilisasi—di Uni Eropa maupun tingkat negara agar advokasi menghasilkan kebijakan yang nyata dan juga diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Uni Eropa.

Bersumber dari website resmi keempat organisasi tersebut, proses-proses legislasi dan politik & birokrasi biasanya dipengaruhi oleh EWL, ESU, EIWH, dan WIDE+ dengan cara-cara seperti memberi rekomendasi/usulan kebijakan, mengirimkan surat

dukungan atau kritikan atas kebijakan, ikut serta dalam konferensi/*public opinion/public hearing* yang sering dilaksanakan oleh Parlemen Eropa maupun Komisi Eropa, hingga *lobbying* dengan mengadakan pertemuan dengan badan-badan Uni Eropa. Kemudian, advokasi dalam proses sosialisasi & mobilisasi biasanya dilakukan dalam bentuk pelatihan, kampanye-kampanye, seminar umum, hingga melakukan demonstrasi atau mengajukan petisi. Dalam membentuk atau merubah pandangan masyarakat agar peka gender, gerakan-gerakan perempuan ini juga banyak melakukan riset dan mempublikasikan hasilnya baik dalam bentuk fisik maupun hanya online.

Kerja pendukung, kerja garis depan, maupun kerja basis yang terlibat dalam advokasi kebijakan gender di Uni Eropa ini sedikit berbeda dengan apa yang di ideal kan dalam teori advokasi (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013). Untuk keempat organisasi tersebut, koordinasi antar 3 bagian kerja tersebut berada di dalam organisasi itu sendiri. Alasan utama nya adalah karena gerakan perempuan/feminisme disini telah berbentuk sebuah organisasi besar—yang menjadi payung gerakan-gerakan perempuan tingkat lokal maupun nasional yang tentunya lebih kecil di dalamnya—bersifat legal dan profesional sehingga 3 kerja/fungsi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan di dalam 1 organisasi. Mengingat sistem Uni Eropa yang memang terbuka terhadap opini publik dan kegiatan advokasi, tidak jarang koordinasi aktor advokasi telah melibatkan salah satu komite/badan dari Uni Eropa sendiri. Advokator-advokator yang terlibat juga merupakan advokator profesional dan mempunyai standar atau sertifikasi tersendiri dalam melakukan kegiatan advokasi. Untuk melakukan advokasi dengan Uni Eropa, mereka juga telah mempunyai advokator penanggung jawab khusus hanya untuk urusan dengan Uni Eropa, seperti : Gea Meijers (WIDE+), Joanna Maycock (EWL), Hildrun Sundseth

(EIWH), dan Helge Schwitters (ESU). (Lobby Facts, 2017)

Di bidang ekonomi, gerakan perempuan EWL dan WIDE+ berhasil melakukan advokasi dalam isu kesetaraan gender di Uni Eropa seperti yang ada dalam tabel dibawah. Pertama, advokasi dalam kebijakan perdagangan di Uni Eropa dari yang *gender-blind* ke *gender-sensitive*. Mereka aktif dalam *working group* besar gerakan perempuan sejak 2015 yang banyak menghasilkan *position paper* dan rekomendasi kebijakan perdagangan yang *feminist* kepada Uni Eropa (Lobby Facts, 2018). Rekomendasi kebijakan juga dilakukan saat konferensi Komisi Eropa maupun Parlemen Eropa tentang kebijakan perdagangan *from gender blind to sensitive* 2015 yang akhirnya berhasil disetujui pada tahun 2018 oleh 512 MEPS dari total 687 anggota (WIDE+, 2018) (WIDE+, 2015). Kemudian, advokasi juga dilakukan saat FEMM dan INTA Parlemen Eropa mengadakan dialog dan *public hearing* mengenai kebijakan perdagangan yang menyetarakan gender pada tahun 2017 (WIDE+, 2017). Selain itu, terkadang mereka juga melakukan advokasi dengan mengirimkan surat kepada repporteur Uni Eropa yang menangani kesetaraan gender dalam kesepakatan perdagangan (WIDE+, 2017).

Kedua, advokasi dalam isu *work-life balance* dan kesetaraan upah yang menjadi salah satu masalah utama ketidaksetaraan gender di Uni Eropa. Mereka aktif memberikan rekomendasi, posisi, kritik, dan usulan kebijakan kepada Uni Eropa—khususnya pada *Committee on Women's Rights and Gender Equality* (FEMM)—dengan mengadakan berbagai pertemuan langsung. Contohnya, pada tahun 2015 diadakan pertemuan membahas inisiatif tentang *work-life balance* dengan *DG Justice* dan *DG Development* Komisi Eropa yang diwakili oleh Monika Ladmanova dan Neven Mimica. Pada tahun 2011, mereka juga mengadakan *peer review* dengan yang lain dan dialog dalam isu kesetaraan gaji pensiunan. Mereka juga mengirimkan *collective complain* kepada Uni

Eropa dalam isu kesetaraan gaji dalam kerja. Selain itu, EWL telah secara terang-terangan menyatakan dukungan dan bantuannya terhadap proposal Edite Estrela (anggota Parlemen Eropa) tahun 2010 agar Parlemen Eropa menyetujui penggantian *1992 Directive on Maternity Leave* ke draft Komisi Eropa tahun 2008—berisi perpanjangan minimum durasi dari 14 minggu ke 20 minggu dengan gaji penuh—yang pada akhirnya disetujui menjadi sebuah resolusi (European Women's Lobby, 2010).

Ketiga, advokasi kebijakan tentang kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam pekerjaan serta perlindungan terhadap ibu hamil dan kekerasan. Mereka aktif menyuarakan rekomendasi dan protes kebijakan kepada Uni Eropa lewat berbagai acara yang diadakan Uni Eropa secara berkala, seperti halnya isu lain di atas. Pada September 2013, Parlemen Eropa mengadakan debat terbuka mengenai isu kesetaraan perlakuan dan kesempatan serta bagaimana kebijakan Uni Eropa harus diarahkan. EWL bersama dengan gerakan perempuan Eropa lainnya ikut menyuarakan rekomendasi, kritik, hingga tuntutan untuk mengadopsi *directives*—termasuk yang telah diajukan oleh Komisi Eropa—agar tidak hanya normatif namun diadopsi hingga level negara anggota (European Women's Lobby, 2014). Tuntutan *directives* ini juga diajukan pada saat berdialog dengan anggota Parlemen Eropa tahun 2012 untuk isu perempuan sebagai direktur atau pembuat keputusan ekonomi agar mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama seperti laki-laki di sebuah perusahaan/lingkungan kerja (European Women's Lobby, 2012). Selain itu, sejak tahun 2015, EWL juga telah aktif dalam mengadakan pertemuan dengan *DG Justice* yang khusus membahas isu terkait (Lobby Facts, 2018).

Di bidang pendidikan, ESU dan EWL berhasil melakukan advokasi di beberapa isu penting. Dari tahun 2011 hingga 2015, ESU aktif mengadvokasi dengan kegiatan kampanye memperjuangkan akses yang setara

untuk pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2014-2015, ESU berhasil mengadakan 3 kali pertemuan dengan anggota Komisi Eropa ataupun *Directorate-General* (DG) nya dalam rangka mendiskusikan kebijakan-kebijakan atau program menyangkut pemuda dan pendidikan, termasuk akses dan kesempatan pendidikan lebih tinggi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Sebagai anggota dari *European Youth Forum and Lifelong Learning Platform*, ESU juga memberikan rekomendasi atau kritik kebijakan secara tidak langsung kepada Uni Eropa tentang isu tersebut.

ESU dan EWL mempunyai banyak akses untuk dapat melakukan *lobbying* ke badan-badan Uni Eropa dalam hal pendidikan dan kesetaraan gender nya. Buktinya, sejak tahun 2007 hingga 2018 telah menjadi bagian dari *European Qualifications Framework Advisory Group* yang bertugas membantu implementasi kebijakan-kebijakan pendidikan oleh Komisi Eropa. Selain itu, dari tahun 2016-2018 ESU juga telah menjadi anggota dalam *ET 2020 Working Group on the Modernisation of Higher Education* milik Uni Eropa (Lobby Facts, 2017). Bahkan beberapa program yang diadakan ESU maupun EWL bersama gerakan perempuan lainnya, berhasil mendapatkan dukungan langsung baik dari Presidensial Komisi Eropa, Parlemen Eropa maupun keseluruhan Uni Eropa. Seperti ERASMUS+ dan *European Week of Action for Girls* (EWAG) yang tujuan utamanya memberi kemudahan dan peningkatan dalam akses, beasiswa, kualitas, hingga kesadaran pendidikan bagi perempuan (European Women's Lobby, 2015). Pada tahun 2015, EWL juga mengadvokasi isu segregasi, stereotype pendidikan, dan diskriminasi perempuan dalam pendidikan agar Uni Eropa segera mengadopsi kebijakan terkait. Hal tersebut dilakukan dengan kampanye dan *lobbying* melewati *repporteur* anggota Parlemen Eropa (EWL, 2015).

Di bidang kesehatan, EIWH dan EWL berhasil mengadvokasi dalam kebijakan kekerasan terhadap

perempuan, fasilitas & akses kesehatan, hingga perlindungan dan hak kesehatan khusus perempuan. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu isu utama yang terjadi umum di Uni Eropa, termasuk surogasi dan *female genital mutilation* yang dianggap EWL dan EIWH sebagai pelanggaran terhadap hak reproduksi dan hak seksual perempuan. EWL mempunyai *EWL Observatory* yang bertujuan untuk memonitor kondisi atau level kekerasan terhadap perempuan di Uni Eropa. *EWL Observatory* menyediakan data dan perkembangan yang bahkan menjadi pedoman/standar perhitungan bagi Uni Eropa dan tercantum dalam Konvensi Istanbul 2017. Sebelumnya, EWL telah beberapa kali melakukan *joint project* bersama Council of Europe di tahun 2013 dalam menangani isu yang sama (EWL, 2017).

Berkaitan dengan isu surogasi dan *female genital mutilation*, EWL telah aktif melakukan advokasi sejak 2012 hingga 2017. Berbagai bentuk advokasi dari melakukan dialog, *partnership*, *joint press release*, *speech* saat konferensi/pertemuan, hingga rekomendasi kebijakan. Kegiatan lobbying ini dilakukan EWL tidak hanya dengan lembaga sosial lainnya tetapi juga secara langsung pada FEMM, beberapa anggota parlemen, hingga berkunjung ke komite/parlemen nasional negara anggota Uni Eropa (EWL, 2012) (European Women's Lobby, 2017).

Sementara itu, EIWH cenderung mengadvokasi kepada isu-isu yang lebih medis. EIWH telah berhasil mengadvokasikan isu-isu ketidaksetaraan kesehatan antara perempuan dan laki-laki dalam kebijakan Uni Eropa, termasuk akses, kesempatan, dan fasilitas/teknologi yang diberikan. Advokasi dilakukan dengan cara-cara : menjadi wakil tuan rumah *multistakeholder workshop* di Brussel pada Januari 2017, datang dalam pertemuan para ahli di Vilnius pada April 2017 untuk diskusi langsung dengan EIGE dalam domain kesehatan di *European Gender Equality Index*, serta mengajukan usulan/rekomendasi kebijakan tentang ketidaksetaraan kesehatan melalui

position paper atau *draft policy* yang kemudian berhasil masuk dalam resolusi Parlemen Eropa (European Women's Lobby, 2011).

Selain itu, EIWH juga mengadvokasi dalam permasalahan uji klinis, keamanan gizi & obat, fasilitas & teknologi kesehatan, penanganan penyakit dan kebutuhan khusus perempuan. EIWH adalah anggota *patient and consumer working party* di *European Medicines Agency* (EMA) dan *Clinical Trial Database working group* yang keduanya mempunyai akses untuk menuliskan *guidelines* kebijakan EMA untuk diajukan ke Uni Eropa. EIWH juga pernah menjadi pembicara saat pertemuan DG Sante (*health and food safety*) sekaligus menjadi *stakeholder pool* nya *Health Technology Assessment Network* untuk membahas permasalahan uji klinis atau obat-obatan untuk pasien perempuan. Pada April 2017, EIWH juga melanjutkan advokasi kesehatan tentang penyakit dan kebutuhan khusus perempuan dengan memaparkan rekomendasi *ASSET Project* kepada Parlemen Eropa sebagai rekomendasi kebijakan kesetaraan gender dalam kesehatan (Lobby Facts, 2018).

Di bidang politik, perjuangan menyetarakan gender cenderung berpusat kepada pemberdayaan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, dari menjadi anggota partai politik hingga menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Kuota gender dan gender empowerment menjadi solusi utama yang sering diadvokasikan oleh gerakan-gerakan perempuan di Uni Eropa, termasuk EWL. Namun, dilihat dari cara dan kegiatannya, gerakan-gerakan perempuan justru lebih fokus melakukan kegiatan yang mendorong para perempuan untuk mau dan mampu berpartisipasi dalam meraih posisi pembuat keputusan daripada melakukan *lobbying* kebijakan kepada Uni Eropa. Contohnya, kampanye EWL “50/50 campaign” tahun 2009 dan 2014 bersama partai-partai demokrat Uni Eropa untuk mendorong partisipasi perempuan sebagai pemilih dan

kandidat calon Parlemen Eropa serta badan lain Uni Eropa agar proporsi gender menjadi setara di kursi Parlemen. Selain itu, EWL juga mengadakan “European Political Mentoring Network 2013-2014” untuk membantu perempuan dari kalangan minoritas termasuk migran untuk bisa berpartisipasi sebagai kandidat anggota Parlemen Eropa serta masih banyak proyek-proyek pemberdayaan perempuan lainnya untuk mendorong partisipasi perempuan di kursi Parlemen Eropa maupun Parlemen Nasional. (European Women's Lobby, 2015)

Kegiatan advokasi yang dilakukan EWL ke Uni Eropa sama seperti yang dilakukan terhadap isu lain. EWL menganggap bahwa dorongan partisipasi politik ini akan lebih efektif jika didorong dari bawah, yaitu perempuan nya sendiri. Meskipun demikian, kebijakan UE juga berpengaruh dalam memulai dan memudahkan hal tersebut. Dari mulai *Strategy For Equality between Women and Men* diluncurkan dan *Beijing Platform for Action* diadopsi oleh UE, EWL rutin memonitor dan melakukan review atas kebijakan dan implementasi yang dilakukan UE. Berbagai surat, dialog, pertemuan, dan usulan kebijakan telah diadvokasikan EWL kepada Uni Eropa, khususnya FEMM, *DG Development*, dan *DG Justice* (Lobby Facts, 2017). Contohnya, pada tahun 2014 EWL telah mengirimkan surat ke 28 perwakilan di *Council of Minister* untuk tidak menghalangi dan justru mempermudah topik *women on power/board* masuk ke agenda pembahasan. (EWL, 2015; EWL, 2014)

Tabel hasil advokasi dari keempat gerakan feminist besar yang ada di Uni Eropa beserta perubahan kebijakan tentang kesetaraan gender Uni Eropa dalam jangkauan tahun 2008 hingga tahun 2018 dapat dilihat secara lebih jelas pada lampiran 1.1 diakhir skripsi ini.